



Penyelenggaraan Pengadaan Suku Cadang Alutsista Guna Mewujudkan Kesiapan Logistik Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Udara

Pasis Sesau A-16^{1*}, Ridwan¹, Puguh Priyono¹

¹Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara, Bandung, Indonesia

*Email: pasissesauA-16@seskoau-mil.id

ABSTRAK

Pembinaan logistik TNI AU pada dasarnya merupakan suatu proses menyiapkan dan mewujudkan materiil, fasilitas, dan jasa yang mencakup pembinaan fungsi-fungsi logistik secara sentralisasi atau desentralisasi. Namun, dalam penyelenggaraannya masih ditemukan permasalahan terkait kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan suku cadang, kompetensi penyedia suku cadang, dan piranti lunak yang belum memadai. Tujuan dari penulisan naskah ini adalah untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pengadaan suku cadang pesawat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara. Metode yang digunakan dalam penulisan naskah ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menguraikan suatu keadaan nyata yang sedang terjadi, berdasarkan informasi dan data-data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Dari hasil pembahasan, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengadaan suku cadang, mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan suku cadang hasil pengadaan, mewujudkan peningkatan kompetensi penyedia suku cadang, dan pemenuhan piranti lunak pengadaan suku cadang yang komprehensif/memadai, sehingga mampu mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

Kata Kunci: Kesiapan Logistik, Suku Cadang Alutsista, Tugas TNI AU

ABSTRACT

Indonesian Air Force logistics development is essentially a process of preparing and delivering materials, facilities, and services, encompassing the development of logistics functions through centralization or decentralization. However, in its implementation, issues remain related to human resource capacity, the inspection and acceptance of spare parts, the competence of spare parts suppliers, and inadequate software. The purpose of this paper is to identify appropriate solutions for improving aircraft spare parts procurement, which can serve as input for leadership in achieving logistical readiness to support the Indonesian Air Force's tasks. The method used in writing this paper is descriptive analysis, describing and outlining a real-world situation. Based on the information and data obtained, these are then analyzed to arrive at conclusions about the problems identified in the research. From the results of the discussion, efforts that can be made are to realize an increase in the quantity and quality of Human Resources (HR) in the field of spare parts procurement, realize an increase in the implementation of inspection and acceptance of spare parts resulting from procurement, realize an increase in the competence of spare parts

*Ridwan

E-mail: pasissesauA-16@seskoau-mil.id

providers, and the provision of comprehensive/adequate spare parts procurement software, so as to be able to realize logistical readiness in order to support the tasks of the Indonesian Air Force.

Keywords: Defense Equipment Spare Parts, Indonesian Air Force Duties, Logistics Readiness

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara (TNI AU), diperlukan kesiapan logistik yang andal agar alat utama sistem senjata (alutsista) senantiasa siap operasional. Kesiapan logistik merupakan faktor strategis dalam mendukung tugas pertahanan negara, penegakan hukum, serta pengamanan wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional. Logistik juga berperan sebagai bagian penting dari *decision support system*, mengingat keberhasilan operasi militer sangat ditentukan oleh dukungan logistik yang memadai.

Pembinaan logistik TNI AU merupakan proses terpadu dalam menyiapkan materiil, fasilitas, dan jasa melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian fungsi-fungsi logistik secara terpusat maupun terdesentralisasi. Tujuan utama pembinaan ini adalah menjamin ketersediaan unsur logistik yang siap dan mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI AU secara berkelanjutan, sehingga diperlukan profesionalitas, soliditas, dan sinergitas antarunsur terkait. Pemenuhan kebutuhan logistik TNI AU dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara berkesinambungan, tepat waktu, dan tepat sasaran. Proses pengadaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Srenau, Slogau, Dismatau, dan Disadaau, dengan Disadaau sebagai pelaksana pengadaan terpusat. Pengadaan difokuskan pada kebutuhan prioritas penggunaan kekuatan, seperti suku cadang pesawat, perbekalan, dan fasilitas pemeliharaan, melalui skema *Foreign Military Sales*, *Direct Commercial Sales*, dan *Indirect Commercial Sales*.

Namun demikian, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kesiapan logistik. Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya pemeriksaan dan penerimaan suku cadang, kompetensi penyedia yang belum memadai, serta keterbatasan piranti lunak pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan pengawasan dan penerimaan hasil pengadaan, peningkatan kompetensi penyedia, serta pengembangan sistem pendukung pengadaan guna meningkatkan kesiapan logistik TNI AU.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi penyelenggaraan pengadaan suku cadang yang mampu mewujudkan kesiapan logistik merupakan kebutuhan organisasi yang harus dilakukan guna menghadapi tantangan perkembangan era revolusi industri 4.0. Untuk itu, perlu dirumuskan upaya optimalisasi penyelenggaraan pengadaan suku cadang secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, optimalisasi penyelenggaraan pengadaan suku cadang dituangkan dalam suatu kebijakan, strategi, dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara jelas dan terarah untuk memecahkan pokok-pokok persoalan, dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai dengan metode yang digunakan serta upaya-upaya guna mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI AU.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang menentukan berupa landasan pemikiran, kondisi penyelenggaraan pengadaan suku cadang saat ini, pengaruh perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi proses pengadaan suku cadang yang diharapkan, kebijakan yang dapat diambil adalah: “Mewujudkan penyelenggaraan pengadaan suku cadang alutsista yang optimal

melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) bidang pengadaan, peningkatan pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan suku cadang hasil pengadaan, kompetensi penyedia suku cadang serta piranti lunak pengadaan suku cadang yang memadai guna mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.”

Strategi-strategi yang tepat, efisien dan efektif dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan rumusan kebijakan tersebut, maka disusun strategi-strategi untuk melaksanakan optimalisasi penyelenggaraan pengadaan suku cadang guna mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI AU sebagai berikut.

- 2.1. **Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)** penyelenggara pengadaan suku cadang melalui penyediaan personel, pendidikan dan Latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut, menggunakan metode pendataan, perekrutan dan TOA/TOD, pendidikan dan latihan serta sosialisasi terhadap sumber daya manusia sebagai pelaksana tugas organisasi, melalui sarana Kemhan, Mabesau dan Disadaau, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelaku pengadaan suku cadang sehingga diharapkan sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan pengadaan suku cadang di Disadaau optimal.
- 2.2. **Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan suku cadang hasil pengadaan sesuai dengan peraturan** yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI melalui koordinasi dan sinkronisasi stakeholder terkait, menggunakan metode konsolidasi dan koordinasi, pengendalian dan pengawasan melalui sarana Mabesau dan Disadaau dengan tujuan agar penyelenggaraan pemeriksaan dan penerimaan suku cadang hasil pengadaan dapat terlaksana dengan optimal.
- 2.3. **Mewujudkan peningkatan kompetensi penyedia suku cadang dalam penyelenggaraan pengadaan suku cadang melalui metode koordinasi dan sosialisasi** melalui sarana Kemhan, Mabesau dan Disadaau dengan tujuan agar proses penyelenggaraan pengadaan suku cadang dapat terlaksana dengan optimal serta mampu berkontribusi terhadap terwujudnya kesiapan logistik dan terdukungnya tugas TNI Angkatan Udara.
- 2.4. **Mewujudkan pemenuhan piranti lunak pengadaan suku cadang yang memadai** untuk menjadi legal standing penyelenggaraan pengadaan suku cadang dan penyederhanaan regulasi yang berasal dari luar melalui pembuatan dan update piranti lunak serta koordinasi, menggunakan metode penyusunan, revisi, sosialisasi dan koordinasi terhadap piranti lunak yang menjadi dasar hukum penyederhanaan regulasi yang berasal dari luar dalam penyelenggaraan pengadaan suku cadang menggunakan sarana Kemhan, Mabesau dan Disadaau, dengan tujuan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang mengatur keterlibatan berbagai instansi untuk pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan suku cadang guna mewujudkan kesiapan logistik dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Udara.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah ini adalah metode deskriptif analisis yang dilakukan dengan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, data-data serta hubungan antara fenomena yang diteliti, selanjutnya menganalisa dan menelaah dengan membandingkan referensi-referensi melalui studi pustaka dari literatur yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pengadaan suku cadang pesawat guna mendukung kesiapan logistik dan pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara, diperlukan serangkaian upaya strategis yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dirumuskan ke dalam empat strategi utama sebagai berikut.

4.1 Strategi Pertama: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pengadaan suku cadang pesawat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Sumber daya manusia pengadaan merupakan unsur organisasi yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan barang dan jasa. Menurut Stoner (2006), manajemen sumber daya manusia merupakan proses berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan personel yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM pengadaan dilakukan melalui pendataan, perekrutan dan mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi.

A. Pendataan

Kementerian Pertahanan, Mabesau, dan Disadaau melaksanakan pendataan kompetensi dan kualifikasi personel pengadaan barang/jasa, khususnya yang terlibat dalam pengadaan suku cadang pesawat. Pendataan meliputi kualifikasi keahlian, kepemilikan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, serta perencanaan kebutuhan personel sesuai struktur organisasi dan standar ideal penyelenggaraan pengadaan.

B. Perekrutan dan TOA/TOD

Perekrutan personel TNI AU dilaksanakan dengan menerapkan standar seleksi yang ketat untuk menghasilkan prajurit yang memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi tinggi. Penempatan dan mutasi personel (TOA/TOD) dilakukan berdasarkan rekomendasi instansi pembina profesi serta kebutuhan organisasi, dengan tujuan memastikan ketersediaan personel yang kompeten pada jabatan pengadaan, khususnya di lingkungan Disadaau.

C. Pendidikan dan Latihan

Upaya peningkatan kompetensi SDM pengadaan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen pengadaan barang/jasa pertahanan, bimbingan teknis, workshop, serta sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sama dengan LKPP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan aspek teknis, prosedural, dan manajerial, sehingga personel mampu melaksanakan tugas pengadaan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sosialisasi

Sosialisasi pengadaan barang/jasa dilaksanakan kepada pejabat dan personel TNI AU serta kepada penyedia barang/jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme, alur, dan persyaratan pengadaan, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pengadaan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

4.2 Strategi Kedua: Peningkatan Pengendalian Pemeriksaan dan Penerimaan Suku Cadang

Dalam rangka menjamin kesesuaian hasil pengadaan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap proses pemeriksaan dan penerimaan suku cadang pesawat. Pemeriksaan dan penerimaan dilaksanakan melalui mekanisme Anname dan Inname dengan memperhatikan ketentuan kontrak dan kelengkapan dokumen pendukung. Pelaksanaan strategi ini melibatkan koordinasi antara Aslog Kasau, Disadaau, Kadisareou, Dismatau, dan Pusbekmatau guna memastikan suku cadang yang diterima memenuhi standar kualitas dan siap disalurkan.

4.3 Strategi Ketiga: Peningkatan Kompetensi Penyedia Suku Cadang

Untuk memperoleh penyedia suku cadang yang kompeten dan profesional, dilaksanakan upaya melalui pengkajian dan penyusunan perencanaan, konsolidasi dan koordinasi, serta pengendalian dan pengawasan pengadaan.

A. Pengkajian dan Penyusunan

Mabesau menyusun Rencana Umum Pengadaan dan menetapkan Surat Perintah Pengadaan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pengkajian dilakukan terhadap kebutuhan, pemakatan pekerjaan, ketersediaan anggaran, serta verifikasi persediaan guna menjamin kesesuaian antara kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran.

B. Konsolidasi dan Koordinasi

Konsolidasi paket pengadaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan. Koordinasi lintas pemangku kepentingan dilaksanakan guna memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan, termasuk pengelolaan kontrak, penanganan klaim garansi, serta pemberian sanksi kepada penyedia yang melakukan wanprestasi.

C. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan pengadaan dilakukan oleh Irjenau, Asrena Kasau, dan Aslog Kasau melalui mekanisme pengawasan internal dan evaluasi berkala guna menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

4.4 Strategi Keempat: Penguatan Regulasi dan Perangkat Pendukung Pengadaan

Untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan, diperlukan penguatan regulasi dan perangkat pendukung melalui penyusunan, revisi, sosialisasi, dan koordinasi kebijakan.

A. Penyusunan dan Revisi Regulasi

Kementerian Pertahanan dan TNI AU menyusun serta merevisi perangkat lunak pengadaan yang belum tersedia atau sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

B. Sosialisasi dan Koordinasi

Sosialisasi regulasi pengadaan dilaksanakan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan TNI AU. Selain itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk menyederhanakan regulasi eksternal serta mendukung prioritas penggunaan industri pertahanan nasional.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai optimalisasi penyelenggaraan pengadaan suku cadang dalam rangka mendukung kesiapan logistik TNI Angkatan Udara, dapat disimpulkan bahwa peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan perlu dilakukan melalui pendataan, perekrutan, TOA/TOD, pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian Pertahanan, Mabesau, dan Disadaau. Selain itu, optimalisasi pemeriksaan dan penerimaan hasil pengadaan suku cadang memerlukan pengendalian dan pengawasan yang efektif agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pengadaan yang optimal juga ditentukan oleh ketersediaan penyedia barang/jasa yang kompeten dan profesional sesuai regulasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Di samping itu, penguatan regulasi pengadaan di Disadaau perlu dilakukan melalui penyusunan, revisi, sosialisasi, dan koordinasi piranti lunak pengadaan yang mutakhir sebagai dasar hukum serta untuk mendukung penyederhanaan regulasi eksternal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1334.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. (2020). Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tentang Doktrin Fungsi Umum (DFU) Logistik TNI AU. Ditetapkan di Jakarta, 21 Desember 2020.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. (2020). Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik. Ditetapkan di Jakarta, 21 Desember 2020.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. (2019). Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta.
- Lukas Dwiantara, S. I. P., & Rumsari Hadi Sumarto, S. I. P. (2004). Manajemen logistik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rosita, A. (t.t.). Perancangan sistem informasi supply chain management (pengadaan barang) bengkel perawatan dan penjualan suku cadang pesawat (studi kasus: Bengkel perawatan pesawat). Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia, Bandung.
- Muhbiantie, R. T. Y. (t.t.). Pengendalian persediaan suku cadang pesawat terbang dengan pendekatan model continuous review. Universitas Sebelas Maret.
- Hutri, D., Sitorus, H., & Santosa, A. I. (t.t.). Analisis dukungan logistik wilayah operasi udara di Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru. Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
- Nandiwardhana, A. P. (t.t.). Analisis persediaan suku cadang rutin airframe pesawat terbang yang digunakan pada planned maintenance di PT. XYZ. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Poerwodarminto, W. J. S. (1982). Kamus umum bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Markas Besar Angkatan Udara (Mabesau). (2011). Terminologi TNI AU.
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau). (2011). Wawasan nusantara. Naskah Sekolah Departemen Kejuangan Seskoau, Lembang.
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau). (2011). Ketahanan nasional. Naskah Sekolah Departemen Kejuangan Seskoau, Lembang.